

## DUKUNGAN DIPLOMASI POLITIK INDONESIA TERHADAP KEMERDEKAAN PALESTINA

7

Humphrey Wangke

### Abstrak

*Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem mengundang kecaman dari banyak negara karena dianggap melanggar hukum internasional tentang status Kota Jerusalem. Indonesia, yang mendukung kemerdekaan Palestina, dan banyak negara di dunia, menentang keputusan AS tersebut. Bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Indonesia berusaha menggagalkan keputusan AS dengan mengajukan draf resolusi kepada Dewan Keamanan (DK) PBB. Seperti yang sudah diperhitungkan, AS memveto draf resolusi itu. Meskipun ketika dibahas di sidang Majelis Umum (MU) PBB draf resolusi itu disetujui, tetapi dukungan dari MU PBB tidak implementatif. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dengan ibu kota di Jerusalem Timur melalui berbagai forum multilateral. Di sisi lain, negara-negara OKI harus tetap solid dalam menggalang kerja sama dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sementara Palestina harus menghentikan konflik internalnya.*

### Pendahuluan

Sesuai dengan janji kampanyenya, pada tanggal 6 Desember 2017 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara mengejutkan memutuskan untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Melalui keputusan ini, AS mengubah kebijakan negerinya yang telah berlaku selama beberapa dekade, dan hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan besar dalam kebijakan luar negeri AS terhadap persoalan Israel-Palestina.

Kebijakan Presiden Trump tersebut sebenarnya hanya penegasan atas berlakunya *Jerusalem Embassy Act* yang dikeluarkan Kongres pada 23 Oktober 1995, yang menjadi dasar hukum bagi dimulainya proses dan alokasi dana pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Namun, mengingat posisi Jerusalem yang senantiasa menjadi pusat perselisihan antara Israel dan Palestina serta menjadi indikator strategis dalam perundingan damai antar-kedua pihak, maka



presiden-presiden AS sebelumnya setiap enam bulan mengeluarkan keputusan untuk menunda (*waiwer*) pemberlakuan undang-undang itu.

Presiden Trump secara tegas mengambil keputusan yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Sikap tegas pemerintahan Trump tersebut diperlihatkan AS di forum PBB, dengan memveto draf resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menolak pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang diajukan oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) pada 18 Desember 2017. Dubes AS untuk PBB Nikki Haley menyatakan draf resolusi DK PBB tersebut merupakan penghinaan terhadap AS. Bagi AS, veto itu dilakukan demi mempertahankan kedaulatan dan merefleksikan kebenaran sejarah.

Tulisan ini akan membahas secara singkat bagaimana dukungan diplomasi politik Indonesia terhadap Palestina harus dilakukan sebagai respons terhadap keputusan AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

## **Memanfaatkan Situasi Timur Tengah**

Pengakuan Presiden Trump terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel tidak terlepas dari situasi politik Timur Tengah yang tidak pernah damai. Dalam beberapa tahun terakhir, isu perdamaian Israel-Palestina dan kemerdekaan Palestina tidak mengalami kemajuan dalam berbagai pembicaraan internasional. Sejak tahun 2014 pembicaraan damai antara Israel dan Palestina yang didukung AS terhenti. Berbagai upaya untuk menghidupkan kembali

pembicaraan damai mengalami jalan buntu, termasuk upaya damai yang diprakarsai Perancis karena Israel menolak untuk hadir. Komunitas global mengandalkan status quo dan berpegang pada solusi dua negara sebagai opsi paling moderat untuk menjawab situasi itu dan menilai sikap Trump justru akan mengancam upaya damai Israel-Palestina.

Di luar perundingan damai Israel-Palestina yang terhenti, revolusi Musim Semi Arab yang berlangsung sejak tahun 2011 telah menimbulkan gejolak konflik bersenjata di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara, serta merebut perhatian dunia atas masalah Palestina. Persoalan di Timur Tengah semakin rumit bila dikaitkan dengan konflik yang tercipta akibat munculnya kelompok ekstrimis ISIS di Irak dan Suriah.

Negara-negara anggota OKI dalam pertemuan di Jakarta dan Ankara, Turki, yang menyerukan boikot terhadap Israel, ternyata belum mampu menempatkan kembali masalah Palestina sebagai agenda prioritas internasional. Hal ini terjadi akibat negara di kawasan sibuk dengan tantangan nyata yang mereka hadapi. Negara-negara muslim di Afrika Utara seperti Tunisia, Mesir, dan Libya pasca-revolusi Musim Semi Arab sibuk dengan urusan dalam negeri seperti ekonomi, pengangguran, dan munculnya ekstrimisme.

Sementara di Turki, pemerintahan Recep Tayyip Erdogan harus bekerja keras mengatasi urusan internal berupa upaya kudeta pada pertengahan Juli 2017 serta referendum di Kurdistan

yang menuntut kemerdekaan. Arab Saudi juga tengah menghadapi masalah internal berupa perebutan kekuasaan di antara para pangeran. Sementara secara regional, Arab Saudi tengah terlibat perang saudara di Yaman yang melibatkan kelompok Shiah Houthi yang didukung Iran. Arab Saudi dan Iran juga berhadapan dalam konflik bersenjata di Suriah.

Secara ekonomi, negara-negara di Timur Tengah juga sedang menghadapi masalah, yaitu penurunan harga minyak mentah dunia akibat kelebihan pasokan. Setiap upaya untuk membatasi produksi seringkali mengalami kegagalan, karena negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEC sulit mencapai kata sepakat. Situasi seperti ini membuat perhatian dan dukungan pada Palestina menurun. Negara-negara sekawasan yang menjadi sandaran Palestina sibuk berkonflik memperebutkan pengaruh di Timur Tengah.

### **Inisiatif Diplomasi Indonesia di Forum Multilateral**

Memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah janji Indonesia sejak menggelar Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Dari 29 negara yang hadir, hanya Palestina yang belum merdeka. Oleh karena itu, Indonesia gencar menyuarakan kepentingan Palestina sejak dulu hingga saat ini. Konsisten dengan sikap itu, Indonesia menyuarakan penolakannya terhadap keputusan Presiden Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Bagi Indonesia, Palestina bukanlah persoalan agama dan dukungan Indonesia terhadap

perjuangan kemerdekaan Palestina bukan hanya kepentingan Indonesia. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mendukung Palestina dalam memperjuangkan hak dan kemerdekaannya merupakan kepentingan Indonesia dan semua pemangku kepentingan di arena internasional. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan dan kemanusiaan di dunia.

Terkait dengan dukungan tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk menggalang kekuatan internasional dalam membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Dalam Konperensi Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki, Presiden Joko Widodo menyampaikan 6 poin usulan sikap negara-negara anggota OKI terhadap langkah AS yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Keenam usulan itu adalah: **pertama**, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral AS tersebut. *Two states solution* merupakan satu-satunya solusi dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

**Kedua**, semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv tidak mengikuti langkah AS memindahkannya ke Jerusalem. **Ketiga**, OKI menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera melaksanakannya. **Keempat**, menyerukan sejumlah negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel untuk meninjau kembali hubungan diplomatik tersebut. **Kelima**, negara-negara anggota OKI harus mengambil langkah bersama dalam hal meningkatkan bantuan kemanusiaan,

peningkatan kapasitas, dan kerja sama ekonomi terhadap Palestina. **Keenam**, OKI menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Majelis Umum (MU) PBB.

Diplomasi Indonesia berhasil menggalang kekuatan negara-negara anggota OKI melawan kekuatan AS di PBB. Sebuah draf resolusi yang dirancang Mesir yang menolak pengakuan AS atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel berhasil dibawa ke Sidang DK PBB. Namun sayangnya draf resolusi itu gagal diadopsi karena veto AS, meskipun 14 negara anggota DK lainnya setuju.

Veto AS sudah diperhitungkan Indonesia dan negara-negara OKI. Oleh karena itu, Indonesia dan dua negara OKI lainnya yaitu Yaman dan Turki mengajukan resolusi serupa dalam sidang MU PBB. Langkah ini merupakan kesepakatan negara-negara OKI di Istanbul yang akan membawa resolusi penolakan keputusan AS ke MU PBB jika gagal di DK PBB. Seperti sudah diduga, kebalikan dari hasil DK PBB, sebanyak 128 negara mendukung resolusi MU PBB yang meminta AS menarik keputusannya mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Hasil pemungutan suara di MU PBB yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2017 menunjukkan mayoritas dukungan pada resolusi PBB. Sebanyak sembilan negara menentang, dan 35 negara abstain.

Hasil tersebut menunjukkan Indonesia bersama mayoritas negara di dunia mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun sayangnya keputusan di

MU PBB tidak mengikat seperti di DK PBB. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana langkah selanjutnya yang bisa dilakukan Indonesia dan negara-negara OKI untuk memperjuangkan konsep *two states nation*?

Menteri Luar Negeri AS Rex W. Tillerson, mengatakan pemindahan kantor Kedutaan Besar AS ke Jerusalem membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. Artinya, masih ada waktu 3 tahun bagi Indonesia dan negara-negara OKI untuk terus mempermasalahkan keputusan Presiden Trump di berbagai forum multilateral, tidak hanya di DK dan MU PBB, tetapi juga di semua organisasi multilateral yang berada di bawah naungan PBB. Bahkan Indonesia dan negara-negara OKI dapat menggunakan forum-forum antarparlemen, seperti forum *Inter-Parliamentary Union* (IPU), *Parliamentary Union of the OIC Member States* (PUIC), dan *Asian Parliamentary Assembly* (APA) dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Diplomasi politik yang dilakukan Indonesia dan negara-negara OKI harus mampu membangun kerja sama untuk memupuk sikap saling percaya dan saling menguntungkan agar terbangun kepedulian pada isu-isu kemanusiaan.

Untuk itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. **Pertama**, penguatan soliditas negara-negara OKI mutlak diperlukan. Bagaimanapun, dengan memperhatikan kondisi kekinian, tidak semua negara termasuk beberapa negara Timur Tengah mengungkapkan kecaman keras atas keputusan Trump tersebut. Dalam OKI sendiri terlihat bahwa Mesir,

Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sebenarnya berlaku lunak terhadap AS. Ketiga negara ini melihat bahwa masalah Palestina telah menjadi beban. Di satu pihak ketiga negara ini ingin berhubungan dengan Israel untuk menghadapi Iran di Timur Tengah, tetapi di pihak lain ada ganjalan isu Palestina yang tidak memungkinkan mereka menjalin hubungan resmi dengan Israel sepanjang masalah Palestina tidak terselesaikan.

**Kedua**, perlu dilakukan penguatan kerja sama ekonomi dengan Palestina, bukan dalam bentuk bantuan, tetapi perdagangan. Indonesia sudah melakukan hal ini dengan menerapkan bea masuk nol persen bagi produk kedua belah pihak. **Ketiga**, membujuk ke-11 faksi yang berada dalam komunitas Palestina untuk tidak terus berkonflik karena hanya akan memperlemah daya tawar mereka sendiri.

### Penutup

Tidak mudah bagi Indonesia dan negara-negara OKI untuk mengubah keputusan Presiden Trump yang telah mengambil langkah untuk melaksanakan *Jerusalem Embassy Act* yang dikeluarkan Kongres pada 23 Oktober 1995. Meskipun tidak mudah mengubah keputusan Presiden Trump tersebut, Indonesia dan negara-negara OKI harus menjadikan langkah AS itu sebagai momentum untuk membangkitkan kembali dukungan diplomasi politiknya terhadap perjuangan bangsa Palestina. Indonesia dan negara-negara OKI harus lebih memperkuat upaya diplomasinya dalam memperjuangkan

kemerdekaan Palestina di berbagai forum multilateral.

Indonesia dan negara-negara OKI, terutama negara Arab di Timur Tengah, harus melakukan pendekatan terhadap negara-negara di dunia melalui berbagai forum multilateral untuk tidak mengikuti langkah AS terkait Jerusalem. Dalam kerangka itu, negara-negara OKI harus membuang semangat konflik di antara mereka dan menggantinya dengan semangat konsolidasi sehingga dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan lebih mendapat perhatian masyarakat internasional.

### Referensi

- "10 Negara Akan Susul Langkah AS", *Suara Pembaruan*, 27 Desember 2017, hal. 14.
- "Aneka Kepentingan di Balik Kenekatan Guatemala", *Koran Tempo*, 29 Desember 2017, hal. 25.
- "Anis Mata, Trump Melawan Dunia Baru", *Republika*, 28 Desember 2017, hal. 4.
- "Bicara di KTT OKI, Jokowi Sampaikan 6 Usulan tentang Soal Yerusalem", *Kompas.com*, edisi 13 Desember 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/13/19022451/bicara-di-ktt-oki-jokowi-sampaikan-enam-usulan-soal-yerusalem/> - diakses 21 Desember 2017.
- "Diancam AS, RI Pantang Kendur", *Media Indonesia*, 22 Desember 2017, hal. 26.
- Hatrawi, Hasibullah, "Peran Indonesia untuk Palestina", *Kompas*, 29 Desember 2017, hal. 7.
- "Iran: Yerusalem, Ibu Kota Palestina", *Suara Pembaruan*, 28 Desember 2017, hal. 14.
- "Israel Kian Mencengkeram", *Kompas*, 3 Januari 2018, hal. 10.

“Israel Rayu 10 Negara agar Ikuti Trump”, *Media Indonesia*, 27 Desember 2017, hal. 24.

“Kalah Di PBB, AS Tetap Berperan Vital”, *Media Indonesia*, 23 Desember 2017, hal. 9.

“Liga Arab Lobi PBB agar Akui Jerusalem”, *Kompas*, 8 Januari 2018, hal. 8.

“Menatap Gejolak Timur Tengah Tahun 2018”, *Kompas*, 2 Januari 2017, hal. 10.

“Menu Retno: Masalah Palestina Bukan Persoalan Agama”, *Kompas.com*, edisi 18 Desember 2017, [https://www.google.co.id/search?dcr=0&source=hp&ei=reheWu3nH4OZ8wW66IzYAQ&q=Menu+Retno%3A+Masalah+Palestina+Bukan+Persoalan+Agama/-diakses 21 Desember 2017](https://www.google.co.id/search?dcr=0&source=hp&ei=reheWu3nH4OZ8wW66IzYAQ&q=Menu+Retno%3A+Masalah+Palestina+Bukan+Persoalan+Agama/-diakses+21+Desember+2017).

“Saudi dan Turki Bahas Status Jerusalem”, *Media Indonesia*, 29 Desember 2017, hal. 2.

“Turki-Chad Tekankan Solusi Adil untuk Jerusalem”, *Media Indonesia*, 28 Desember 2017, hal. 14.



Humphrey Wangke  
[humphrey.wangke@dpr.go.id](mailto:humphrey.wangke@dpr.go.id)

Drs. Humphrey Wangke, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Saat ini sedang menyelesaikan studi S3 di Program Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Menjadi peneliti pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 1990 dengan bidang kepakaran Masalah-masalah Hubungan Internasional. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Perjanjian Kemitraan dan Kerja sama Indonesia-Uni Eropa” (2013); “Sekuritisasi Polusi Lintas Batas di Kawasan Asia Tenggara” (2014); dan “Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo dalam Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur di Indonesia” (2015).

#### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.